



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 6 TAHUN 1975
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
1975/1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, terutama bagi anak-anak yang berumur 7 -12 tahun, khususnya bagi anak-anak yang akan memasuki kelas 1 Sekolah Dasar, perlu dalam Tahun Anggaran 1975/1976 diadakan penambahan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar baru sehingga jumlah anak yang berumur 7 - 12 tahun yang dapat ditampung di Sekolah Dasar pada akhir Repelita II dapat mencapai 85 % (delapan puluh lima persen).
- b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali sarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1975/1976 dilaksanakan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) sebagian dari jumlah Sekolah Dasar yang ada.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1975.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3037).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974.
7. Instuksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973.
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974.

M E N G I N S T R U K S I K A N



Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
5. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.
6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1976 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 April 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI

LAMPIRAN
INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1975
Tanggal 10 April 1975.

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
1975/1976

BAB I
UMUM



Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Instruksi Presiden ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1975/1976 untuk pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar (termasuk perabot sekolah) yang dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih, penyediaan guru, buku-buku pelajaran pokok dan penataran guru, dan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan, serta rehabilitasi sebagian dari jumlah sekolah dasar yang ada.

Pasal 2

(1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan memasuki kelas 1 Sekolah-sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan di bagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

(2) Bantuan tersebut diberikan Pula untuk mengatasi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah-daerah proyek transmigrasi serta daerah-daerah perbatasan.

BAB II

JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

Pasal 3

(1) Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 disediakan bantuan untuk pembangunan 10.000 (sepuluh ribu) gedung Sekolah Dasar.

(2) Pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar untuk tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Untuk tiap Daerah Tingkat I pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar dilakukan secara proporsional menurut perkiraan jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 dalam masing -masing Daerah Tingkat I sebagai persentase jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 di seluruh Indonesia.

(3) Pembagian untuk tiap Daerah Tingkat II didasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Untuk tiap Daerah Tingkat II pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar dilakukan secara proporsional menurut perkiraan jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 dalam masing-masing Daerah Tingkat II sebagai persentase jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.



BAB III LOKASI GEDUNG SEKOLAH

Pasal 4

Penentuan lokasi gedung sekolah dalam masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati /Waikota, setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Pembinaan Dasar dan Luar Biasa (Ka Kabin PDPLB) yang bersangkutan dengan memperhatikan :

- a. Daerah pedesaan yang masih banyak terdapat anak-anak berumur sekitar 7 tahun yang belum mendapat tempat di Sekolah-Sekolah Dasar yang ada.
- b. Bagian dari daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
- c. Proyek-proyek transmigrasi dan daerah-daerah perbatasan yang memerlukan Sekolah Dasar.

BAB IV TAHAP DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

Pasal 5

Bantuan diberikan secara bertahap :

- a. Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 disediakan bantuan untuk 1 (satu) unit yang terdiri atas :
 - a.1. 3 (tiga) ruangan kelas yang segera dapat dipergunakan.
 - a.2. 1 (satu) ruangan guru.
 - a.3. Kamar kecil.
 - a.4. Perabot sekolah.
 - a.5. Sumber air bersih/pompa air/sumur.

- b. Dalam tahun berikutnya disediakan bantuan untuk satu unit yang terdiri atas 3 (tiga) ruangan kelas, kamar kecil dan perabot sekolah.

Pasal 6

Besarnya bantuan didasarkan kepada hal-hal berikut :

- a. Penggunaan tenaga dan bahan setempat kecuali apabila tidak terdapat tenaga dan bahan tersebut.
- b. Biaya satuan yang ditentukan sebagai berikut :
 - b.1. Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan (tidak termasuk Ibukota-Ibukota Daerah Tingkat I : Rp. 4. 000. 000, -(empat juta rupiah).
 - b.2. Ibukota-Ibukota Daerah Tingkat I di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan : Rp. 4. 500. 000, -(empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b.3. Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Rp.4.500 000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah).



- b.4. Maluku : Rp. 5.000. 000, - (lima juta rupiah)
- b.5. Jakarta :Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- b.6. Irian Jaya : Rp. 6. 500. 000, -(enam juta lima ratus ribu rupiah).

c. Biaya satuan di atas ditambahi dengan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya satuan penyediaan sumber air bersih/pompa air/sumur.

BAB V JUMLAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

Pasal 7

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 ini disediakan pula bantuan rehabilitasi untuk 10.000 (sepuluh ribu) gedung Sekolah Dasar yang ada.
- (2) Pembagian jumlah rehabilitasi gedung Sekolah Dasar tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
 - (a) Setiap Daerah Tingkat I mendapat bantuan rehabilitasi untuk sejumlah gedung Sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan (rusak berat/rusak ringan) secara proporsional terhadap jumlah gedung Sekolah yang memerlukan perbaikan di seluruh Indonesia.
 - (b) Setiap Daerah Tingkat II mendapat bantuan rehabilitasi untuk sejumlah gedung Sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan (rusak berat/rusak ringan) secara proporsional terhadap jumlah gedung Sekolah dasar yang memerlukan perbaikan diseluruh Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Besarnya biaya satuan rehabilitasi ditetapkan rata-rata, Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) .

BAB VI PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

Bantuan disalurkan melalui :

- a. Kantor Bendahara Negara.
- b. Bank Rakyat Indonesia.
- c. Bank Ekspor-Impor Indonesia, untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut secara bersama, oleh Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri yang bersangkutan dengan Pelaksanaan Program Bantuan tersebut.

BAB VII KEWAJIBAN DAERAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9



(1). Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas, ditambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.

(2). Apabila bantuan tidak mencukupi maka kekurangannya di penuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

(3). Pemeliharaan gedung sekolah Dasar yang dibangun adalah tanggungjawab Pemerintah. Daerah bersama masyarakat setempat.

Pasal 10

(1) Pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar dimaksud dalam Program Bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu April - Desember 1975 dan telah mulai dapat dipergunakan dalam bulan Januari 1976.

(2) Ruangan-ruangan kelas yang tersedia dalam bulan Januari 1976 harus segera dipergunakan seintensif mungkin untuk menampung murid-murid baru kelas I dan tidak untuk menampung murid-murid pindahan dari Sekolah Dasar yang sudah ada.

(3) Pada waktu terluang ruangan-ruangan kelas dimanfaatkan untuk pendidikan masyarakat di luar sistim sekolah (pendidikan non-formil).

BAB VIII LAIN - LAIN

Pasal 11

Penyediaan biaya bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung Sekolah Dasar tersebut dalam Pedoman ini, tidak meniadakan dan/atau menggantikan :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar dengan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri.
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar di Daerah Tingkat II.

Pasal 12

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang di-



bangun, penyediaan buku pelajaran pokok dan penataran guru, penyediaan Buku Bacaan serta keserasian kelancaran program bantuan ini dipertanggungjawabkan kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama maupun sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing, oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Negara EKUIN/Ketua BAP-PENAS dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/ Wakil Ketua BAPPENAS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI



SAMPLE SERIAL

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR**

6 MAY 13
Copy 1977

**MENURUT INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 6 TAHUN 1975**

Lampiran Keputusan Bersama :

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENTERI
KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA BAPPENAS,

Nomor : 58 Tahun 1975

Nomor : 077/P/1975

Nomor : Kep. - 362/MK/IV/4/1975

Nomor : Kep. - 986/Ket./IV/1975

Tanggal 15 April 1975

Perincian jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Masing-masing
Daerah Tingkat II — Tahun 1975/1976.

Perincian jumlah gedung Sekolah Dasar tiap Daerah Tingkat I 1975/1976

Biaya dalam ribuan rupiah.

No.	Nama Daerah Tingkat I	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air/Sumur		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan 3 + (5) + (7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air/ Sumur	Bantuan	Unit	Bantuan	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	D.I. Aceh	190	765.000	190	5.700	211	105.500	876.200
2.	Sumatera Utara	790	3.178.000	790	23.700	889	444.500	3.646.200
3.	Sumatera Barat	210	846.500	210	6.300	392	196.000	1.048.800
4.	R i a u	170	684.000	170	5.100	171	85.500	774.600
5.	J a m b i	130	526.000	130	3.900	92	46.000	575.900
6.	Sumatera Selatan	210	850.500	210	6.300	302	151.000	1.007.800
7.	Bengkulu	45	181.500	45	1.350	78	39.000	221.850
8.	L a m p u n g	255	1.025.500	255	7.650	204	102.000	1.135.150
9.	DKI Jakarta	200	1.700.000	200	6.000	132	66.000	1.772.000
10.	Jawa Barat	1.760	7.055.000	1.760	52.800	1.527	763.500	7.871.300
11.	Jawa Tengah	1.845	7.398.500	1.845	55.350	1.990	995.000	8.448.850
12.	D.I. Yogyakarta	150	611.500	150	4.500	121	60.500	676.500
13.	Jawa Timur	1.925	7.718.500	1.925	57.750	1.214	607.000	8.303.250
14.	Kalimantan Barat	240	973.500	240	7.200	181	90.500	1.071.200
15.	Kalimantan Tengah	95	384.000	95	2.850	135	67.500	454.350
16.	Kalimantan Selatan	280	1.145.000	280	8.400	230	115.000	1.268.400
17.	Kalimantan Timur	60	245.500	60	1.800	120	60.000	307.300
18.	Sulawesi Utara	130	585.000	130	3.900	144	72.000	660.900
19.	Sulawesi Tengah	80	360.000	80	2.400	209	104.500	466.900
20.	Sulawesi Selatan	380	1.710.000	380	11.400	680	340.000	2.061.400
21.	Sulawesi Tenggara	70	315.000	70	2.100	201	100.500	417.600
22.	M a l u k u	60	300.000	60	1.800	118	59.000	360.800
23.	B a l i	230	941.000	230	6.900	250	125.000	1.072.900
24.	Nusa Tenggara Barat	305	1.372.500	305	9.150	261	130.500	1.512.150
25.	Nusa Tenggara Timur	115	517.500	115	3.450	132	66.000	586.950
26.	Irian Jaya	75	487.500	75	2.250	16	8.000	497.750
J U M L A H :		10.000	41.877.000	10.000	300.000	10.000	5.000.000	47.177.000

Perincian jumlah gedung Sekolah Dasar tiap Daerah Tingkat II/Kotamadya

1. Daerah Istimewa Aceh

Biaya dalam ribuan rupiah.

No.	Daerah Tingkat II	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air/Sumur		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan (3) + (5) + (7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air atau Sumur	Bantuan	Rehabilitasi Unit	Bantuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01.	Ktm. Banda Aceh	10	45.000	10	300	8	4.000	49.300
02.	Ktm. Sabang	3	12.000	3	90	5	2.500	14.590
03.	Kab. Aceh Besar	17	68.000	17	510	12	6.000	74.510
04.	Kab. Pidie	26	104.000	26	780	33	16.500	121.280
05.	Kab. Aceh Utara	46	184.000	46	1.380	65	32.500	217.880
06.	Kab. Aceh Timur	21	84.000	21	630	8	4.000	88.630
07.	Kab. Aceh Tengah	6	24.000	6	180	7	3.500	27.680
08.	Kab. Aceh Tenggara	10	40.000	10	300	15	7.500	47.800
09.	Kab. Aceh Barat	26	104.000	26	780	26	13.000	117.780
10.	Kab. Aceh Selatan	25	100.000	25	750	32	16.000	116.750
Daerah Istimewa Aceh		190	765.000	190	5.700	211	105.500	876.200

2. Daerah Tingkat I Sumatera Utara

01.	Kotamadya Medan	36	162.000	36	1.080	25	12.500	175.580
02.	Kotamadya Pematang Siantar	24	96.000	24	720	10	5.000	101.720
03.	Kotamadya Tanjung Balai	11	44.000	11	330	10	5.000	49.330
04.	Kotamadya Binjai	20	80.000	20	600	10	5.000	85.600
05.	Kotamadya Tebingtinggi	10	40.000	10	300	10	5.000	45.300
06.	Kotamadya Sibolga	16	64.000	16	480	10	5.000	69.480
07.	Kabupaten Deli Serdang	157	628.000	157	4.710	90	45.000	677.710
08.	Kabupaten Langkat	48	192.000	48	1.440	50	25.000	218.440
09.	Kabupaten Karo	20	80.000	20	600	30	15.000	95.600
10.	Kabupaten Simalungun	85	340.000	85	2.550	60	30.000	372.550
11.	Kabupaten Asahan	75	300.000	75	2.250	80	40.000	342.250
12.	Kabupaten Labuanbatu	46 x)	184.000	46	1.380	50	25.000	210.380
13.	Kabupaten Tapanuli Tengah	18	72.000	18	540	35	17.500	90.040
14.	Kabupaten Tapanuli Selatan	80	320.000	80	2.400	154	77.000	399.400
15.	Kabupaten Tapanuli Utara	79	316.000	79	2.370	156	78.000	396.370
16.	Kabupaten Nias	42	168.000	42	1.260	54	27.000	196.260
17.	Kabupaten Dairi	23	92.000	23	690	55	27.500	120.190
Propinsi Sumatera Utara		790	3.178.000	790	23.700	889	444.500	3.646.200

2 SD untuk daerah Transmigrasi : 1 Gaya Baru Merbo.

2 Kuala Hulu.

3. Daerah Tingkat I Sumatera Barat

01.	Kotamadya Padang	13	58.500	13	390	5	2.500	61.390
02.	Kotamadya Bukittinggi	3	12.000	3	90	4	2.000	14.090
03.	Kotamadya Sawahlunto	2	8.000	2	60	4	2.000	10.060
04.	Kotamadya Padangpanjang	3	12.000	3	90	4	2.000	14.090
05.	Kotamadya Solok	2	8.000	2	60	4	2.000	10.060
06.	Kotamadya Payakumbuh	4	16.000	4	120	4	2.000	18.120
07.	Kabupaten Agam	28	112.000	28	840	55	27.500	140.340
08.	Kabupaten Pasaman	10 x)	40.000	10	300	51	25.500	65.800
09.	Kabupaten Limapuluhkota	20	80.000	20	600	30	15.000	95.600

3. Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Biaya dalam ribuan rupiah.

No.	Daerah Tingkat II	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air/Sumur		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan (3)+(5)+(7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air atau Sumur	Bantuan	Rehabilitasi Unit	Bantuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	Kabupaten Solok	22	88.000	22	660	37	18.500	107.160
11.	Kabupaten Padang Pariaman	45	180.000	45	1.350	68	34.000	215.350
12.	Kabupaten Pesisir Selatan	22 x)	88.000	22	660	47	23.500	112.160
13.	Kabupaten Tanahdatar	22	88.000	22	660	39	19.500	108.160
14.	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	14 xxx)	56.000	14	420	40	20.000	76.420
Propinsi Sumatera Barat		210	846.500	210	6.300	392	196.000	1.048.800

x) 2 SD untuk daerah Transmigrasi di Simpang Ampat.

xx) 1 SD untuk daerah Transmigrasi di Pancung Soal.

xxx) 2 SD untuk daerah Transmigrasi di Tanjung Gadang.

4. Daerah Tingkat I Riau

01.	Kotamadya Pekanbaru	8	36.000	8	240	11	5.500	41.740
02.	Kabupaten Kampar	30	120.000	30	900	38	19.000	139.900
03.	Kabupaten Indragiri Ilir	37 x)	148.000	37	1.110	17	8.500	157.610
04.	Kabupaten Indragiri Hulu	23 x)	92.000	23	690	42	21.000	113.690
05.	Kabupaten Kepulauan Riau	32	128.000	32	960	21	10.500	139.460
06.	Kabupaten Bengkalis	40	160.000	40	1.200	42	21.000	182.200
Propinsi Riau		170	684.000	170	5.100	171	85.500	774.600

x) 1 SD untuk daerah Transmigrasi di Tempuling.

xx) 1 SD untuk daerah Transmigrasi di Kuantan Tengah

5. Daerah Tingkat I Jambi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Ktm. Jambi	12	54.000	12	360	11	5.500	59.860
02. Kab. Batanghari	21	84.000	21	630	14	7.000	91.630
03. Kab. Bangko Sarolangun	27	108.000	27	810	20	10.000	118.810
04. Kab. Kerinci	22	88.000	22	660	23	11.500	100.160
04. Kab. Tanjungjabung	24 x)	96.000	24	720	6	3.000	99.720
05. Kab. Bungo Ebo Tebo	24	96.000	24	720	18	9.000	105.720
Propinsi Jambi	130	526.000	130	3.900	92	46.000	575.900

x) 4 SD untuk daerah Transmigrasi

3 di Muara Saba

1 di Nipah Panjang

6. Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Biaya dalam ribuan rupiah,

No.	Daerah Tingkat II	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air/Sumur		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan (3)+(5)+(7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air atau Sumur	Bantuan	Rehabilitasi Unit	Bantuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
01.	Kotamadya Palembang	21	94.500	21	630	19	9.500	104.630
02.	Kotamadya Pangkal Pinang	4	16.000	4	120	6	3.000	19.120
03.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	30	120.000	30	900	58	29.000	149.900
04.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	35 x)	140.000	35	1.050	33	16.500	157.550
05.	Kabupaten Lahat	25	100.000	25	750	37	18.500	119.250
06.	Kabupaten Lahat	21	84.000	21	630	39	19.500	104.130
07.	Kabupaten Musi Rawas	17 xx)	68.000	17	510	23	11.500	80.010
08.	Kabupaten Musi Banyuasin	28 xxx)	112.000	28	840	36	18.000	150.840
09.	Kabupaten Bangka	21	84.000	21	630	40	20.000	104.630
10.	Kabupaten Belitung	8	320.000	8	240	11	5.500	37.740
Propinsi Sumatera Selatan :		210	850.500	210	6.300	302	151.000	1.007.800

x) 9 SD untuk daerah Transmigrasi	xx) 2 SD untuk daerah Transmigrasi	xxx) 2 SD untuk daerah Transmigrasi
1 di Cempaka	1 di Musi Hulu	1 di Simpang
7 di Belitung	1 di Musi Hulu 2	1 di Banyu Asin
1 di Mesuji		

7. Daerah Tingkat I Lampung

01.	Kotamadya Tanjungkarang	11	49.500	11	330	7	3.500	53.330
02.	Kabupaten Lampung Utara	45 x)	180.000	45	1.350	53	26.500	207.850
03.	Kabupaten Lampung Tengah	95 xx)	380.000	95	2.850	72	36.000	418.850
04.	Kabupaten Lampung Selatan	104 xxx)	416.000	104	3.120	72	36.000	455.120
Propinsi Lampung :		255	1.025.500	255	7.650	204	102.000	1.135.150

x) 11 SD untuk daerah Transmigrasi	xx) 7 SD untuk daerah Transmigrasi	xxx) 2 SD untuk daerah Transmigrasi
2 di Blangbangan Umpu	1 di Terbanggi Besar	di Ketibung
9 di Panaragan	6 di Seputih Surabaya	

8. Daerah Tingkat I Bengkulu

01.	Kotamadya Bengkulu	3	13.500	3	90	6	3.000	16.590
02.	Kabupaten Bengkulu Selatan	14 x)	56.000	14	420	24	12.000	68.420
03.	Kabupaten Bengkulu Utara	9 xx)	36.000	9	270	24	12.000	48.270
04.	Kabupaten Rejang Lebong	19	76.000	19	570	24	12.000	88.570
Propinsi Bengkulu		45	181.500	45	1.350	78	39.000	221.850

x) 3 SD Untuk daerah Transmigrasi di Sluna	xx) 3 SD untuk daerah Transmigrasi di : 2 di Kerkap
	1 di Pondok Kelapa

9. Daerah Tingkat I Jawa Barat

Biaya dalam ribuan rupiah

No.	Daerah Tingkat II	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air/Sumur		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan (3)+(5)+(7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air atau Sumur	Bantuan	Rehabilitasi Unit	Bantuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
01.	Kotamadya Bogor	20	80.000	20	600	13	6.500	87.100
02.	Kotamadya Bandung	30	135.000	30	900	15	7.500	143.400
03.	Kotamadya Sukabumi	15	60.000	15	450	7	3.500	63.950
04.	Kotamadya Cirebon	16	64.000	16	480	12	6.000	70.480
05.	Kabupaten Pandenglang	60	240.000	60	1.800	50	25.000	266.800
06.	Kabupaten Serang	75	300.000	75	2.250	62	31.000	333.250
07.	Kabupaten Lebak	89	356.000	89	2.670	39	19.500	378.170
08.	Kabupaten Bekasi	84	336.000	84	2.520	62	31.000	368.520
09.	Kabupaten Krawang	75	300.000	75	2.250	68	34.000	336.250
10.	Kabupaten Purwakarta	40	160.000	40	1.200	33	16.500	177.700
11.	Kabupaten Tangerang	80	320.000	80	2.400	59	29.500	351.900
12.	Kabupaten Bogor	120	480.000	120	3.600	100	50.000	533.600
13.	Kabupaten Sukabumi	130	520.000	130	3.900	99	49.500	573.400
14.	Kabupaten Cianjur	100	400.000	100	3.000	100	50.000	453.000
15.	Kabupaten Bandung	132	528.000	132	3.960	150	75.000	606.960
16.	Kabupaten Sumedang	47	188.000	47	1.410	42	21.000	210.410
17.	Kabupaten Garut	102	408.000	102	3.060	96	48.000	459.060
18.	Kabupaten Tasikmalaya	80	320.000	80	2.400	97	48.500	370.900
19.	Kabupaten Ciamis	75	300.000	75	2.250	121	60.500	362.750
20.	Kabupaten Cirebon	70	280.000	70	2.100	75	37.500	319.600
21.	Kabupaten Kuningan	45	180.000	45	1.350	45	22.500	203.850
22.	Kabupaten Indramayu	140	560.000	140	4.200	60	30.000	594.200
23.	Kabupaten Majalengka	55	220.000	55	1.650	59	29.500	251.150
24.	Kabupaten Subang	80	320.000	80	2.400	63	31.500	353.900
Propinsi Jawa Barat :		1.760	7.055.000	1.760	52.800	1.527	763.500	7.871.300

10. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

01.	Jakarta Pusat	57	484.500	57	1.710	35	17.500	503.710
02.	Jakarta Barat	36	306.000	36	1.080	11	5.500	312.580
03.	Jakarta Utara	25	212.500	25	750	35	17.500	230.750
04.	Jakarta Selatan	48	408.000	48	1.440	30	15.000	424.440
05.	Jakarta Timur	34	289.000	34	1.020	21	10.500	300.520
DKI Jakarta :		200	1.700.000	200	6.000	132	66.000	1.772.000

11. Daerah Tingkat I Jawa Tengah

01.	Kotamadya Magelang	8	32.000	8	240	10	5.000	37.240
02.	Kotamadya Pekalongan	13	52.000	13	390	11	5.500	57.890
03.	Kotamadya Tegal	10	40.000	10	300	13	6.500	46.800
04.	Kotamadya Semarang	37	166.500	37	1.110	27	13.500	181.110
05.	Kotamadya Salatiga	7	28.000	7	210	8	4.000	32.210
06.	Kotamadya Surakarta	18	72.000	18	540	26	13.000	85.540
07.	Kabupaten Banyumas	60	240.000	60	1.800	111	55.500	297.300
08.	Kabupaten Purbolinggo	50	200.000	50	1.500	65	32.500	234.000
09.	Kabupaten Cilacap	121	484.000	121	3.630	100	50.000	537.630
10.	Kabupaten Banjarnegara	60	240.000	60	1.800	65	32.500	274.300

11. Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Biaya dalam ribuan rupiah

No.	Daerah Tingkat II	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air/Sumur		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan (3)+(5)+(7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air atau Sumur	Bantuan	Rehabilitasi Unit	Bantuan	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Kabupaten Magelang	55	220.000	55	1.650	50	25.000	246.650
12.	Kabupaten Temanggung	43	172.000	43	1.290	70	35.000	193.290
13.	Kabupaten Wonosobo	46	184.000	46	1.380	69	34.500	220.380
14.	Kabupaten Purworejo	50	200.000	50	1.500	82	41.000	236.000
15.	Kabupaten Kebumen	80	320.000	80	2.400	57	28.500	363.400
16.	Kabupaten Pekalongan	45	180.000	45	1.350	57	28.500	208.850
17.	Kabupaten Pemalang	69	276.000	69	2.070	70	35.000	313.070
18.	Kabupaten Tegal	48	192.000	48	1.440	67	33.500	226.940
19.	Kabupaten Brebes	110	440.000	110	3.300	90	45.000	488.300
20.	Kabupaten Semarang	49	196.000	49	1.470	50	25.000	222.470
21.	Kabupaten Kendal	50	200.000	50	1.500	61	30.500	232.000
22.	Kabupaten Demak	55	220.000	55	1.650	38	19.000	240.650
23.	Kabupaten Grobogan	81	324.000	81	2.430	49	24.500	350.930
24.	Kabupaten Pati	90	360.000	90	2.700	70	35.000	397.700
25.	Jepara	71	284.000	71	2.130	42	21.000	307.130
26.	Kabupaten Rembang	52	208.000	52	1.560	45	22.500	232.060
27.	Kabupaten Bora	65	260.000	65	1.950	60	30.000	291.950
28.	Kabupaten Kudus	50	200.000	50	1.500	40	20.000	221.500
29.	Kabupaten Klaten	43	172.000	43	1.290	55	27.500	200.790
30.	Kabupaten Boyolali	56	224.000	56	1.680	90	45.000	270.680
31.	Kabupaten Sragen	55	220.000	55	1.650	90	45.000	266.650
32.	Kabupaten Sukoharjo	36	144.000	36	1.080	42	21.000	166.080
33.	Kabupaten Karanganyar	39	156.000	39	1.170	34	17.000	174.170
34.	Kabupaten Wonogiri	67	268.000	67	2.010	133	66.500	336.510
35.	Kabupaten Batang	56	224.000	56	1.680	60	30.000	255.680
Propinsi Jawa Tengah :		1.845	7.398.500	1.845	55.350	1.990	995.000	8.448.850

12. Daerah Istimewa Yogyakarta

01.	Kotamadya Yogyakarta	23	103.500	23	690	13	6.500	110.590
02.	Kabupaten Bantul	40	160.000	40	1.200	23	11.500	172.700
03.	Kabupaten Sleman	40	160.000	40	1.200	17	8.500	169.700
04.	Kabupaten Gunung Kidul	25	100.000	25	750	42	21.000	121.750
05.	Kabupaten Kulon Progo	22	88.000	22	660	26	13.000	101.660
Daerah Istimewa Yogyakarta :		150	611.500	150	4.500	121	60.500	676.500

13. Daerah Tingkat I Jawa Timur

01.	Kotamadya Surabaya	37	166.500	37	1.110	35	17.500	185.110
02.	Kotamadya Mojokerto	10	40.000	10	300	5	2.500	42.500
03.	Kotamadya Madiun	15	60.000	15	450	12	6.000	66.450
04.	Kotamadya Kediri	16	64.000	16	480	8	4.000	68.480
05.	Kotamadya Blitar	16	64.000	16	480	8	4.000	68.480
06.	Kotamadya Malang	15	60.000	15	450	22	11.000	71.450
07.	Kotamadya Pasuruan	14	56.000	14	420	11	5.500	61.500
08.	Kotamadya Probolinggo	16	64.000	16	480	12	6.000	70.480
09.	Kabupaten Surabaya	58	232.000	58	1.740	10	5.000	238.740

13. Daerah Tingkat I Jawa Timur

Biaya dalam ribuan rupiah

No.	Daerah Tingkat II	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan (3)+(5)+(7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air atau Sumur	Bantuan	Rehabilitasi Unit	Bantuan	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	Kabupaten Sidoarjo	30	120.000	30	900	43	21.500	142.400
11.	Kabupaten Mojokerto	29	116.000	29	870	25	12.500	129.370
12.	Kabupaten Bojonegoro	85	340.000	85	2.550	45	22.500	365.050
13.	Kabupaten Jombang	54	216.000	54	1.620	26	13.000	230.620
14.	Kabupaten Tuban	77	308.000	77	2.310	24	12.000	322.310
15.	Kabupaten Lamongan	85	340.000	85	2.550	40	20.000	362.550
16.	Kabupaten Madiun	37	148.000	37	1.110	40	20.000	169.110
17.	Kabupaten Ngawi	46	184.000	46	1.380	17	8.500	193.880
18.	Kabupaten Magetan	23	92.000	23	690	17	8.500	101.190
19.	Kabupaten Ponorogo	40	160.000	40	1.200	11	5.500	166.700
20.	Kabupaten Pacitan	35	140.000	35	1.050	46	23.000	164.050
21.	Kabupaten Kediri	38	152.000	38	1.140	38	19.000	172.140
22.	Kabupaten Nganjuk	46	184.000	46	1.380	55	27.500	212.880
23.	Kabupaten Blitar	47	188.000	47	1.410	34	17.000	206.410
24.	Kabupaten Tulungagung	40	160.000	40	1.200	60	30.000	191.200
25.	Kabupaten Trenggalek	32	128.000	32	960	22	11.000	139.960
26.	Kabupaten Malang	120	480.000	120	3.600	95	47.500	531.100
27.	Kabupaten Pasuruan	40	160.000	40	1.200	93	46.500	207.700
28.	Kabupaten Probolinggo	56	224.000	56	1.680	37	18.500	244.180
29.	Kabupaten Lumajang	60	240.000	60	1.800	16	8.000	249.800
30.	Kabupaten Bondowoso	48	192.000	48	1.440	32	16.000	209.440
31.	Kabupaten Panarukan (Situbondo)	80	320.000	80	2.400	32	16.000	338.400
32.	Kabupaten Jember	130	520.000	130	3.900	80	40.000	563.900
33.	Kabupaten Banyuwangi	140	560.000	140	4.200	69	34.500	598.700
34.	Kabupaten Pamekasan	40	160.000	40	1.200	12	6.000	167.200
35.	Kabupaten Sampang	100	400.000	100	3.000	17	8.500	411.500
36.	Kabupaten Sumenep	90	360.000	90	2.700	33	16.500	379.200
37.	Kabupaten Bangkalan	80	320.000	80	2.400	32	16.000	338.400
Propinsi Jawa Timur :		1.925	7.718.500	1.925	57.750	1.214	607.000	8.383.250

x) Terbagung dalam Kabupaten yang bersangkutan

14. Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

01.	Kotamadya Pontianak	27	121.500	27	810	19	9.500	131.810
02.	Kabupaten Pontianak	53 xx)	212.000	53	1.590	13	6.500	220.090
03.	Kabupaten Sambas	54	216.000	54	1.620	50	25.000	242.620
04.	Kabupaten Ketapang	24	96.000	24	720	21	10.500	107.220
05.	Kabupaten Sanggau	38	152.000	38	1.140	45	22.500	175.640
06.	Kabupaten Sintang	28	112.000	28	840	21	10.500	123.340
07.	Kabupaten Kapuas Hulu	16	64.000	16	480	12	6.000	70.480
Propinsi Kalimantan Barat :		240 x)	973.500	240	7.200	181	90.500	1.071.200

x) 38 S.D. untuk daerah Perbatasan

xx) 6 S.D. untuk daerah Transmigrasi : 3 di Sei Kakap
2 di Kubu
1 di Mempawah Hulu.

15. Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Biaya dalam ribuan rupiah

No.	Daerah Tingkat II	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air/Sumur		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan (3)+(5)+(7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air atau Sumur	Bantuan	Rehabilitasi Unit	Bantuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01.	Kotamadya Palangka Raya	8	36.000	8	240	9	4.500	40.740
02.	Kabupaten Kapuas	30 x)	120.000	30	900	44	22.000	142.900
03.	Kabupaten Barito Utara	11	44.000	11	330	31	15.500	59.830
04.	Kabupaten Barito Selatan	11	44.000	11	330	17	8.500	52.830
05.	Kabupaten Kotawaringin Barat	13	52.000	13	390	17	8.500	60.890
06.	Kabupaten Kotawaringin Timur	22	88.000	22	660	17	8.500	97.160
Propinsi Kalimantan Tengah		95	384.000	95	2.850	135	67.500	454.350

x) 6 S.D. untuk daerah Transmigrasi di :

- 1 di Kahayan Ilir
- 1 di Pulang Pisau
- 4 di Silat

16. Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

01.	Kotamadya Banjarmasin	50	225.000	50	1.500	24	12.000	238.500
02.	Kabupaten Barito Kuala	22	88.000	22	660	15	7.500	96.160
03.	Kabupaten Banjar	55	220.000	55	1.650	40	20.000	241.650
04.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	28	112.000	28	840	19	9.500	122.340
05.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	12	48.000	12	360	41	20.500	68.860
06.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	40	160.000	40	1.200	28	14.000	175.200
07.	Kabupaten Kota Baru	25 x)	100.000	25	750	13	6.500	107.250
08.	Kabupaten Tapin	18 xx)	72.000	18	540	17	8.500	81.040
09.	Kabupaten Tabalong	18	72.000	18	540	20	10.000	82.540
10.	Kabupaten Tanah Laut	12	48.000	12	360	13	6.500	54.860
Propinsi Kalimantan Selatan :		280	1.145.000	280	8.400	230	115.000	1.268.400

x) 2 S.D. untuk daerah Transmigrasi

- 1 di Pulo Laut Timur
- 2 di Sebelimbangan

xx) 1 S.D. untuk daerah Transmigrasi

- di Tapin Selatan

17. Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

01.	Kotamadya Balikpapan	9	36.000	9	270	11	5.500	41.770
02.	Kotamadya Samarinda	11 x)	(49.500)	11	330	35	17.500	67.330
03.	Kabupaten Kutai	18 xx)	72.000	18	540	35	17.500	90.040
04.	Kabupaten Berau	6	24.000	6	180	11	5.500	29.680
05.	Kabupaten Bulungan	10	40.000	10	300	22	11.000	51.300
06.	Kabupaten Pasir	6 xxx)	24.000	6	180	6	3.000	27.180
Propinsi Kalimantan Timur :		60	245.500	60	1.800	120	60.000	307.300

x) 2 S.D. untuk daerah Transmigrasi

- 1 di Loaajan
- 1 di Samarinda Ilir

xx) 5 S.D. untuk daerah Transmigrasi

- 1 di Anggana
- 1 di Tenggarong
- 1 di Molek
- 1 di Barong Tokek
- 1 di Long Iram

xxx) 1 S.D. untuk daerah Transmigrasi

- di Tanah Grogot

18. Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

Biaya dalam ribuan rupiah

No.	Daerah Tingkat II	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air/Sumur		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan (3)+(5)+(7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air atau Sumur	Bantuan	Rehabilitasi Unit	Bantuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01.	Kotamadya Manado	20	90.000	20	600	3	1.500	92.100
02.	Kotamadya Gorontalo	24	108.000	24	720	7	3.500	112.220
03.	Kabupaten Sangihe Talaud	19	85.500	19	570	5	2.500	88.570
04.	Kabupaten Minahasa	24	108.000	24	720	13	6.500	115.220
05.	Kabupaten Bolaang Mongondow	22 x)	99.000	22	660	26	13.000	112.660
06.	Kabupaten Gorontalo	21	94.500	21	630	90	45.000	140.130
Propinsi Sulawesi Utara :		130	585.000	130	3.900	144	72.000	660.900

x) 5 S.D. untuk daerah Transmigrasi

- 4 di Domuga
- 1 di Paguyaman

19. Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

01.	Kabupaten Buol Toli-Toli	10	45.000	10	300	35	17.500	62.800
02.	Kabupaten Donggala	32 x)	144.000	32	960	90	45.000	189.960
03.	Kabupaten Poso	20 xx)	90.000	20	600	51	25.500	116.100
04.	Kabupaten Luwuk Banggai	18 xxx)	81.000	18	540	33	16.500	98.040
Propinsi Sulawesi Tengah :		80	360.000	80	2.400	209	109.500	466.900

x) 5 SD untuk daerah Transmigrasi

- 1 di Biromaru
- 4 di Parigi

xx) 2 SD untuk daerah Transmigrasi

- 1 di Poso Pesisir
- 1 di More Atas

xxx) 2 SD untuk daerah Transmigrasi

- 1 di Batui
- 1 di Lamila.

20. Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

01.	Kotamadya Ujungpandang	20	90.000	20	600	18	9.000	99.600
02.	Kotamadya Pare Pare	5	22.500	5	150	8	4.000	26.650
03.	Kabupaten Mamuju	7	31.500	7	210	9	4.500	36.210
04.	Kabupaten Lumu	24 x)	108.000	24	720	72	36.000	144.720
05.	Kabupaten Majene	6	27.000	6	180	18	9.000	36.180
06.	Kabupaten Polewali Mamasa	23	103.500	23	690	50	25.000	129.190
07.	Kabupaten Tana Toraja	21	94.500	21	630	22	11.000	106.130
08.	Kabupaten Enrekang	8	36.000	8	240	18	9.000	45.240
09.	Kabupaten Pinrang	15	67.500	15	450	26	13.000	80.950
10.	Kabupaten Sidenreng Rappang	12	54.000	12	360	26	13.000	67.360
11.	Kabupaten Wajo	23	103.500	23	690	43	21.500	125.690
12.	Kabupaten Soppeng	15	67.500	15	450	38	19.000	86.950
13.	Kabupaten Barru	10	45.000	10	300	15	7.500	52.800
14.	Kabupaten Pangkajene	37	247.500	55	1.650	24	12.000	261.150
15.	Kabupaten Bone	57	166.500	37	1.110	79	39.500	207.110
16.	Kabupaten Maros	13	58.500	13	390	38	19.000	77.890
17.	Kabupaten Gowa	17	76.500	17	510	29	14.500	91.510
18.	Kabupaten Sinjai	11	49.500	11	330	20	10.000	59.830

20. Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Biaya dalam ribuan rupiah.

No.	Daerah Tingkat II	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air/Sumur		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan (3)+(5)+(7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air atau Sumur	Bantuan	Rehabilitasi Unit	Bantuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
19.	Kabupaten Bulukumba	19	85.500	19	570	48	24.000	110.070
20.	Kabupaten Bantaeng	7	31.500	7	210	13	6.500	38.210
21.	Kabupaten Jeneponto	11	49.500	11	330	34	17.000	66.830
22.	Kabupaten Takalar	12	54.000	12	360	16	8.000	62.360
23.	Kabupaten Selayar	9	40.500	9	270	16	8.000	48.770
Propinsi Sulawesi Selatan		380	1.710.000	380	11.400	680	340.000	2.061.400

x) 9 SD untuk daerah Transmigrasi
6 di Bone-Bone
1 di Mangkutana
2 di Wotu.

21. Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

01.	Kabupaten Kolaka	6 x)	27.000	6	180	18	9.000	36.180
02.	Kabupaten Kendari	15 xx)	67.500	15	450	19	24.500	92.450
03.	Kabupaten Muna	24	108.000	24	720	60	30.000	138.720
04.	Kabupaten Buton	25	112.500	25	750	74	37.000	150.250
Propinsi Sulawesi Tenggara		70	315.000	70	2.100	201	100.500	417.600

x) 3 SD untuk daerah Transmigrasi : 2 di Tirowuto
1 di Utundu Leha

xx) 3 SD untuk daerah Transmigrasi di : 2 di Ranometa
1 di Lainya

22. Daerah Tingkat I Bali

01.	Kab. Buleleng	44	176.000	44	1.320	48	24.000	201.320
02.	Kab. Jembrana	22	88.000	22	660	25	12.500	101.160
03.	Kab. Tabanan	25	100.000	25	750	45	22.500	123.250
04.	Kab. Badung	42	189.000	42	1.260	31	15.500	205.760
05.	Kab. Gianyar	30	120.000	30	900	33	16.500	137.400
06.	Kab. Klungkung	16	64.000	16	480	11	5.500	69.880
07.	Kab. Bangli	18	72.000	18	540	25	12.500	85.040
08.	Kab. Karangasem	33	132.000	33	990	32	16.000	148.990
Propinsi Bali		230	941.000	230	6.900	250	125.000	1.072.900

23. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

01.	Kab. Lombok Barat	72	324.000	72	2.160	26	13.000	339.160
02.	Kab. Lombok Tengah	70	315.000	70	2.100	40	20.000	337.100
03.	Kab. Lombok Timur	72	324.000	72	2.160	50	25.000	351.160
04.	Kab. Sumbawa	31	139.500	31	930	60	30.000	170.430
05.	Kab. Dompu	13	58.500	13	390	35	17.500	76.390
06.	Kab. Bima	47	211.500	47	1.410	50	25.000	237.910
Propinsi Nusa Tenggara Barat		350	1.372.500	305	9.150	261	130.500	1.512.150

24. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Biaya dalam ribuan rupiah.

No.	Daerah Tingkat II	Pembangunan Gedung S.D.		Pompa Air/Sumur		Rehabilitasi		Jumlah Bantuan (3)+(5)+(7)
		Jumlah Unit	Bantuan	Pompa Air atau Sumur	Bantuan	Rehabilitasi Unit	Bantuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01.	Kab. Sumba Timur	8	36.000	8	240	15	7.500	43.740
02.	Kab. Sumba Barat	9	40.500	9	270	16	8.000	48.770
03.	Kab. Manggarai	14	63.000	14	420	4	2.000	65.420
04.	Kab. Ngada	9	40.500	9	270	4	2.000	42.770
05.	Kab. Ende	8	36.000	8	240	10	5.000	41.240
06.	Kab. Sikka	7	31.500	7	210	4	2.000	33.710
07.	Kab. Flores Timur	13	58.500	13	390	4	2.000	60.890
08.	Kab. Kupang	14	63.000	14	420	25	12.500	75.920
09.	Kab. Timor Tengah Selatan	10	45.000	10	300	38	19.000	64.300
10.	Kab. Timor Tengah Utara	7	31.500	7	210	4	2.000	33.710
11.	Kab. Belu	8	36.000	8	240	4	2.000	38.240
12.	Kab. Alor	8	36.000	8	240	4	2.000	38.240
Propinsi, Nusa Tenggara Timur		115	517.500	115	3.450	132	66.000	586.950

25. Daerah Tingkat I Maluku

01.	Ktm. Ambon	5	2.500	5	150	3	1.500	26.650
02.	Kab. Maluku Utara	26	130.000	26	780	47	23.500	154.280
03.	Kab. Maluku Tengah	21 x)	105.000	21	630	49	24.500	130.130
04.	Kab. Maluku Tenggara	8	40.000	8	240	19	9.500	49.740
Propinsi Maluku :		60	300.000	60	1.800	118	59.000	360.600

x) 2 SD untuk daerah Transmigrasi di Kairatu.

26. Daerah Tingkat I Irian Jaya

01.	Kabupaten Jayapura	11	71.500	11	330	2	1.000	72.830
02.	Kabupaten Teluk Cenderawasih	8	52.000	8	240	2	1.000	53.240
03.	Kabupaten Yapen/Waropen	6	39.000	6	180	2	1.000	40.180
04.	Kabupaten Manokwari	8	52.000	8	240	2	1.000	53.240
05.	Kabupaten Sorong	8	52.000	8	240	2	1.000	53.240
06.	Kabupaten Fak - Fak	8	52.000	8	240	2	1.000	53.240
07.	Kabupaten Merauke	10	65.000	10	300	2	1.000	66.300
08.	Kabupaten Pegunungan Jaya Wijaya	7	45.500	7	210	1	500	46.210
09.	Kabupaten Paniai	9	58.500	9	270	1	500	59.270
Propinsi Irian Jaya		75	487.500	75	2.250	16	8.000	497.750